

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (masing-masing telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004), merupakan awal mula dari otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berisi tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Deskripsi yang tepat tentang otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia. Otonomi daerah mengacu pada pemberian kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya dan kebijakan lokal. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mandiri dan fleksibel dalam mengatasi masalah-masalah dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh daerah mereka. Penerapan otonomi daerah menjadi kunci esensial dalam membenahi kesejahteraan rakyat. Maksud dari penerapan otonomi daerah pada umumnya adalah memberikan

keleluasaan dan kesempatan kepada daerah untuk memiliki kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahannya. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Namun, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan adanya sistem desentralisasi yang transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik yang bersih, media memainkan peran penting sebagai salah satu mekanisme pengawasan dan transparansi. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan alat yang penting untuk memfasilitasi tercapainya laporan keuangan yang kompetitif dan transparan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas pemerintah daerah dalam periode tertentu. Laporan keuangan yang kompetitif dapat diartikan sebagai laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi yang baik dan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain atau dengan target anggaran yang telah ditetapkan.

Anggaran pemerintah memang merupakan alat perencanaan dan pengendalian yang sangat penting bagi pemerintah. Ini berfungsi sebagai panduan untuk mengalokasikan sumber daya publik, baik dalam bentuk pendapatan maupun belanja, untuk mencapai tujuan dan kebijakan pemerintah. Sebagai alat perencanaan, anggaran pemerintah menetapkan target atau tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan sebagai alat pengendalian, anggaran pemerintah mengatur alokasi sumber daya publik yang telah disetujui oleh lembaga legislatif, seperti

parlemen atau dewan perwakilan rakyat. Data rekening belanja yang ada dalam anggaran belanja daerah memainkan peran penting sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Dalam siklus anggaran, yaitu pada penjadwalan dan penataan anggaran, dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang ada. Penentuan taksiran pendapatan dan pengeluaran dalam proses persiapan dan penyusunan anggaran dilakukan dengan proses estimasi. Menurut Mardiasmo (2002), menyatakan bahwa dalam estimasi dalam penyusunan anggaran memang dihadapkan pada faktor ketidakpastian (uncertainty) yang cukup tinggi. Lemahnya perencanaan anggaran dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya *underfinancing* atau *overfinancing*, yang keduanya dapat berdampak pada tingkat efisiensi dan efektivitas unit kerja pemerintah. Anggaran sebagai alat untuk melakukan strategi organisasi harus dipersiapkan sebaik-baiknya agar tidak terjadi bias atau penyimpangan.

Penilaian kinerja tidak hanya berlaku pada lembaga atau individu yang berorientasi profit atau bisnis komersial saja, tetapi juga relevan dan perlu dilakukan pada lembaga atau individu non-komersial. Penilaian kinerja pada lembaga atau individu non-komersial penting untuk mengukur sejauh mana mereka mencapai tujuan dan misi mereka, serta seberapa efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan mereka.. Hal ini diartikan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah melakukan tugasnya dalam roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan menyampaikan laporan keuangan. Dengan menyampaikan laporan keuangan dan menyusun APBD, pemerintah daerah dapat mengukur sejauh mana kinerja keuangan mereka, menilai apakah pendapatan mencukupi untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan,

serta memberikan informasi transparan bagi masyarakat tentang penggunaan anggaran publik.

Setiap Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan penyajian dan keberhasilan masyarakat secara demokratis, adil, berkesinambungan, dan seimbang. Selain itu, Pemerintah Daerah juga memiliki tanggung jawab untuk mengatur potensi daerah, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Jika Pemerintah Daerah mampu mengelola pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, berkesinambungan, dan merata dengan baik, maka dapat dianggap bahwa pemerintah telah menjalankan kewajibannya dengan efektif. Untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dan menilai kinerja keuangan, perlu ditetapkan standar acuan atau indikator kinerja keuangan yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Indikator ini membantu dalam mengukur capaian pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan mengevaluasi kinerja keuangan mereka secara objektif. Analisis rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu perangkat yang efektif untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Analisis rasio keuangan membantu dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan mengukur hubungan dan proporsi antara berbagai unsur anggaran pendapatan dan belanja. (Utomo, 2011). Pengukuran kinerja keuangan pada APBD memungkinkan terjadinya evaluasi dan pemulihan kinerja pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

Analisis laporan keuangan ialah salah satu media atau cara yang dimaksudkan untuk melihat dan menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya

(Farida & Nugraha, 2019). Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada APBD. Analisis rasio keuangan pada APBD membantu mengukur hubungan dan proporsi antara berbagai unsur pendapatan dan belanja yang terkandung dalam anggaran. Adapun analisis rasio keuangan tersebut terdiri dari rasio derajat desentralisasi, ketergantungan daerah, kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio keserasian belanja, dan rasio pertumbuhan sebagai alat analisis untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Menurut Halim (2007) menyatakan bahwa analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Menurut (Assidiqi, 2016), menyatakan bahwa laporan realisasi anggaran sangat bermanfaat dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan dalam periode mendatang. Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi tentang seberapa baik anggaran yang telah direncanakan terealisasi di lapangan dalam periode tertentu. Melalui laporan ini, pemerintah daerah dapat melakukan analisis komparatif dan evaluasi terhadap kinerja keuangan serta penggunaan dana publik yang telah dilakukan.

Kota Payakumbuh selama delapan tahun berturut-turut telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada Laporan Keuangan Pemerintah



Daerah ([www.sumbar.bpk.go.id/berita](http://www.sumbar.bpk.go.id/berita), 15 Juni 2022). Laporan realisasi anggaran menjadi bukti nyata dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks pemerintahan yang transparan dan akuntabel, pemerintah daerah berkomitmen untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat terkait pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program pemerintah. Hal ini menunjukkan Kota Payakumbuh telah meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan cara mencapai kesehatan fiskal daerah, pengelolaan keuangan secara menyeluruh dan perbaikan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan pengkajian mendalam pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk melihat kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya keuangan daerah sehingga dapat menilai kemampuan pemerintah sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017-2021”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis rasio derajat desentralisasi terhadap laporan keuangan Kota Payakumbuh?
2. Bagaimana analisis rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap laporan keuangan Kota Payakumbuh?
3. Bagaimana analisis rasio kemandirian keuangan daerah terhadap laporan keuangan Kota Payakumbuh?

4. Bagaimana analisis rasio efektivitas terhadap laporan keuangan Kota Payakumbuh?
5. Bagaimana analisis rasio efisiensi terhadap laporan keuangan Kota Payakumbuh?
6. Bagaimana analisis rasio keserasian terhadap laporan keuangan Kota Payakumbuh?
7. Bagaimana analisis rasio pertumbuhan terhadap laporan keuangan Kota Payakumbuh?

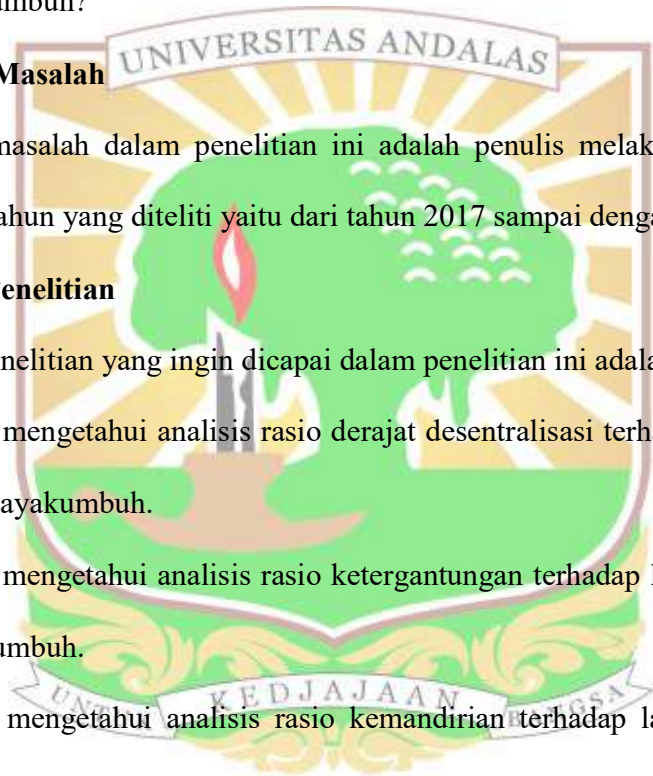
### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penulis melakukan penelitian dalam lima periode tahun yang diteliti yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis rasio derajat desentralisasi terhadap laporan keuangan Kota Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui analisis rasio ketergantungan terhadap laporan keuangan Kota Payakumbuh.
3. Untuk mengetahui analisis rasio kemandirian terhadap laporan keuangan Kota Payakumbuh.
4. Untuk mengetahui analisis rasio efektivitas terhadap laporan keuangan Kota Payakumbuh.
5. Untuk mengetahui analisis rasio efisiensi terhadap laporan keuangan Kota Payakumbuh.



6. Untuk mengetahui analisis rasio keserasian terhadap laporan keuangan Kota Payakumbuh.
7. Untuk mengetahui analisis rasio pertumbuhan terhadap laporan keuangan Kota Payakumbuh.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis mengenai analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah dan sebagai salah satu proses bagi penulis untuk semakin meningkatkan keterampilan dalam penelitian dan pembuatan karya tulis ilmiah.
2. Bagi Pemerintah Daerah, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait dalam pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Bagi pihak lain, melalui hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi dengan judul Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017-2021, tersusun dalam lima bab. Penulis akan menyajikan uraian singkat yang akan dibahas pada masing-masing bab yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang tulisan ini, dengan sistematika sebagai berikut:



## **BAB I       PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II       KERANGKA TEORITIS**

Bab ini menjelaskan kajian teori yang berkaitan dengan penelitian serta konsep yang relevan dalam membahas permasalahan yang telah dirumuskan.

## **BAB III       METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan paparan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Bab ini meliputi desain penelitian, sumber data penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan dan sumber data, metode pengolahan dan teknik analisis data.

## **BAB IV       HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini diuraikan tentang gambaran umum Kota Payakumbuh, penyajian data penelitian, dan analisis data penelitian.

## **BAB V       PENUTUP**

Bab ini membahas kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian. Serta beberapa saran yang dapat diharapkan bisa berguna bagi Pemerintah Kota Payakumbuh dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

